PANITIA SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC*
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVIII
TAHUN 2022

PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XVIII
NOMOR: 04/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2022

Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan **persyaratan** sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan ditandatangani oleh pelamar;
b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
c. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,00;
i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,00;
l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 6 (enam) lembar;
m. Fotokopi KTP;
n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :

1. **Peserta yang pernah mengikuti seleksi Tahap XVII Tahun 2022 dan dinyatakan lulus administrasi, tidak perlu melengkapi persyaratan (kecuali surat lamaran dan Pas Foto).**
2. **Pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id mulai tanggal 5 Juli 2022 s/d 4 Agustus 2022.**
3. **Peserta yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan untuk mengirimkan seluruh persyaratan administrasi yang dimasukkan dalam amplop tertutup warna cokelat polos dan diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.**
   - **Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN**
   - **Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PT**

   berkas sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 5 Agustus 2022.
4. **Pengumuman kelulusan administrasi, ujian tertulis dan tahap seleksi selanjutnya dapat dilihat pada website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, Kompas TV (MA News) dalam Program Sapa Indonesia Pagi pukul 07.00 – 09.00 WIB, dan Media Sosial Mahkamah Agung.**
5. **Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.**
6. **Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (*Open Book*).**

Jakarta, 5 Juli 2022

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVIII TAHUN 2022

Ketua,	**Sekretaris,**
ttd.	**ttd.**
Dr. H. SUHADI, SH., MH.	**DR. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.**

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVIII TAHUN 2022

NAMA PELAMAR :.....

NOMOR BERKAS :.....

KODE YANG DILAMAR : **(PN / PT)***

TANGGAL TERIMA BERKAS :.....

1. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc.* ☐
2. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang. ☐
3. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah. ☐
4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah. ☐
5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat. ☐
6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian ☐
7. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00. ☐
8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00. ☐
9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00. ☐
10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. ☐
11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00. ☐
12. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (enam) lembar. ☐
13. Fotokopi KTP. ☐
14. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. ☐
15. Daftar Riwayat Hidup lengkap. ☐

KETERANGAN :	TTD & NAMA PEMERIKSA BERKAS
	(.....)

Catatan:
* Coret yang tidak perlu
Berkas disusun berdasarkan urutan Kelengkapan Persyaratan Administratif.